

TESIS

**PENJUALAN OBJEK SITA JAMINAN OLEH
TERGUGAT DALAM PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS
NIM. 2320215310086**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2025

**PENJUALAN OBJEK SITA JAMINAN OLEH
TERGUGAT DALAM PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Hukum

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

Muhammad Enrico Hamlizar Tulis

NIM. 2320215310086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER ILMU HUKUM
2025**

Judul Tesis : **PENJUALAN OBJEK SITA JAMINAN OLEH
TERGUGAT DALAM PENGADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL**

Nama : **MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS**

NIM : **2320215310086**

**Disetujui,
Pembimbing**



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DINILAI
PADA TANGGAL 2025**

Pembimbing



**Dr. Saprudip, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004**

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Enrico Hamlizar Tulis

NIM : 2320215310086

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Judul Tesis : Penjualan Objek Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiarisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025
Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular postmark stamp. The stamp contains the text 'ALAM KUNYIT' and '123'.

Muhammad Enrico Hamlizar Tulis, S.H

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

Muhammad Enrico Hamlizar

2320215310086

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

15 %

Banjarmasin, 7 Juli 2025

Mengetahui,
An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 19820610 2005011 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS. 2025. Penjualan Objek Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan 102 Halaman.

RINGKASAN

Tesis ini mengangkat tema perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penjualan benda bergerak hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebuah ranah yang selama ini belum diatur secara komprehensif dan menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, ketika terjadi perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan adanya putusan pengadilan yang memerintahkan pembayaran sejumlah uang oleh perusahaan kepada pekerja, maka untuk menjamin eksekusi tersebut, dilakukan penyitaan terhadap benda bergerak milik perusahaan. Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaan sita jaminan ini menimbulkan kerugian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan atas benda yang disita tersebut.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah belum adanya mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pihak-pihak yang berpotensi dirugikan oleh tindakan sita jaminan dan penjualan benda bergerak tersebut. Mekanisme hukum yang ada saat ini lebih bersifat represif, yaitu melalui gugatan perdata setelah terjadinya penjualan, yang sering kali tidak efektif dalam mengembalikan keadaan seperti semula. Tesis ini menyoroti kebutuhan mendesak akan mekanisme preventif dalam proses sita jaminan yang dapat melibatkan pihak-pihak terkait sebelum dilakukannya penjualan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak keperdataan yang sah.

Dalam menganalisis masalah tersebut, tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berpijak pada teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membedakan antara perlindungan preventif dan represif. Penelitian ini juga mengkaji teori keadilan, teori negara hukum, dan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi jaminan, serta mengadopsi analogi dari hukum kepailitan, khususnya terkait *actio pauliana*. Mekanisme *actio pauliana* memberikan ruang bagi kurator atau kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kepentingan kreditur sebelum jatuhnya pailit. Konsep ini dinilai relevan untuk diadaptasi dalam konteks hubungan industrial, agar perlindungan hukum tidak hanya hadir setelah kerugian terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sita jaminan dan penjualan benda bergerak di PHI sering kali tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, dan partisipasi pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa benda yang disita bukan merupakan milik sah tergugat, atau terdapat hak kepemilikan dari pihak ketiga yang belum diverifikasi secara mendalam. Ketika benda tersebut telah dijual melalui lelang,

pihak ketiga hanya memiliki upaya hukum melalui gugatan perdata yang cenderung memakan waktu lama, biaya tinggi, dan belum tentu efektif.

Tesis ini merekomendasikan pembentukan mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan preventif sebelum dilakukan penjualan hasil sita jaminan. Mekanisme tersebut dapat berupa prosedur verifikasi yuridis terhadap objek sita, pemberitahuan resmi kepada pihak ketiga yang mungkin berkepentingan, dan pemberian hak untuk mengajukan keberatan sebelum penjualan dilakukan. Dalam jangka panjang, diperlukan pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur tentang tata cara sita jaminan dan penjualan benda bergerak di PHI dengan mengacu pada prinsip *due process of law*.

Sebagai kontribusi akademik dan praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya meletakkan prinsip keadilan substantif dalam setiap tahapan proses peradilan hubungan industrial, termasuk dalam pelaksanaan sita dan eksekusi. Perlindungan hukum tidak cukup hanya hadir pada tahap akhir melalui putusan pengadilan atau gugatan lanjutan, tetapi harus dibangun secara sistematis sejak tahap awal. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan semangat reformasi hukum yang ingin mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak seluruh warga negara.

Kata Kunci : Sita Jaminan; Benda Bergerak; Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); Eksekusi; Perlindungan Hukum

MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS. 2025. Penjualan Objek Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan 102 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap para pihak dalam proses penjualan benda bergerak hasil sita jaminan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam praktiknya, eksekusi atas putusan PHI kerap dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan benda milik perusahaan untuk memenuhi hak pekerja, seperti pesangon atau gaji yang belum dibayarkan. Namun, sering kali pelaksanaan sita jaminan tidak disertai dengan verifikasi menyeluruh mengenai status hukum dan kepemilikan sah atas benda yang disita, sehingga berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Saat ini, perlindungan hukum yang tersedia bersifat represif, yaitu melalui gugatan setelah penjualan terjadi, yang tidak selalu memberikan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Teori utama yang digunakan adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, serta teori keadilan dan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi. Penulis juga mengadopsi pendekatan analogis terhadap mekanisme *actio pauliana* dalam hukum kepailitan sebagai acuan perlindungan hukum preventif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembentukan mekanisme hukum yang memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan lelang atas objek sita. Disarankan agar prosedur sita jaminan di PHI dilengkapi dengan verifikasi kepemilikan, pemberitahuan kepada pihak ketiga, dan hak untuk menempuh upaya hukum preventif. Reformasi ini penting demi mewujudkan asas keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum secara menyeluruh dalam proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Sita Jaminan; Benda Bergerak; Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); Eksekusi; Perlindungan Hukum

MUHAMMAD ENRICO HAMLIZAR TULIS. 2025. Penjualan Objek Sita Jaminan Oleh Tergugat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M dan 102 Halaman.

ABSTRACT

*This study examines legal protection for parties involved in the sale of movable assets resulting from security seizures (sita jaminan) in the Industrial Relations Court (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI). In practice, execution of PHI decisions is often carried out through the seizure and auction of company-owned assets to fulfill workers' rights such as severance pay or unpaid wages. However, the seizure process frequently lacks comprehensive verification of the legal status and rightful ownership of the seized property, creating a high risk of harm to third parties who are not directly involved in the dispute. Currently, the available legal remedies are primarily repressive—offered only after the sale occurs—often failing to provide effective restitution. This research adopts a normative juridical method with a conceptual and statutory approach. The main theoretical foundation is Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, supported by theories of justice and the principle of prudence in legal execution. The study also draws on an analogical approach to the actio pauliana mechanism found in bankruptcy law, which enables creditors to annul transactions that harm their interests prior to a formal declaration of bankruptcy. The findings indicate an urgent need to establish preventive legal mechanisms allowing interested parties to raise objections before auction execution. It is recommended that the seizure procedure in PHI include ownership verification, notification to third parties, and the right to pursue legal remedies pre-sale. Such reforms are vital to uphold the principles of justice, legal certainty, and comprehensive protection in the settlement of labor disputes. **Keywords: Security seizure, movable assets, Industrial Relations Court, legal protection, actio pauliana, compensation***

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum dalam Penjualan Sita Jaminan Putusan Verstek di Pengadilan Hubungan Industrial”** Tesis ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ilmu Hukum** pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Terselesaikannya karya ilmiah ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2022–2026, atas segala dukungan dan arahnya selama masa studi.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan, fasilitas, dan perhatian penuh terhadap keberlangsungan studi penulis serta mahasiswa lainnya.
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, kesabaran, serta masukan-masukan ilmiah yang sangat berarti. Beliau telah membimbing penulis secara konsisten, dengan pendekatan akademik yang bijaksana, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini secara sistematis dan komprehensif.
4. Para dosen penguji dan seluruh pengasuh mata kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membagikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi akademik selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.
5. Seluruh staf akademik, administrasi, dan keuangan pada Program Magister Ilmu Hukum, atas pelayanan dan bantuan teknis yang mempermudah proses akademik penulis.
6. Secara khusus, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Hamli Tulis dan Ibunda Sri Hartati**, sosok luar biasa yang senantiasa

menjadi cahaya dan naungan dalam setiap langkah penulis. Doa-doa tulus yang tak pernah henti, kasih sayang yang tak terbatas, dan kepercayaan yang selalu diberikan telah menjadi pondasi utama dalam menapaki setiap fase kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

7. Tak lupa pula, rasa hormat dan cinta penulis persembahkan kepada **Ayah Mertua Satriawan dan Ibu Mertua Ida Wahyuni**, yang tidak hanya menerima penulis sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga telah menjadi pelita semangat, keteduhan hati, dan teladan ketulusan dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran mereka adalah anugerah, dan dukungan mereka adalah kekuatan yang tak ternilai dalam perjalanan ini.
8. Sosok istimewa yang selalu hadir dalam suka dan duka, Nanda Satriyani Dewi, S.H pasangan hidup yang telah memberikan cinta, doa, kesabaran, serta kekuatan batin yang luar biasa selama perjalanan studi ini. Terima kasih atas pengorbanan dan kesetiaan dalam menemani langkah penulis sampai titik ini.
9. Kautsar Ismail, sahabat seperjuangan yang setia menemani dalam perjalanan akademik ini dalam diskusi, kerja sama, dan saling menguatkan ketika tantangan datang silih berganti. Terima kasih atas kebersamaan dan ketulusan yang tak ternilai.
10. **Rekan-rekan seperjuangan pencari makan dari keringat rakyat**, yaitu **PT. Tulis Media Utama** dan **CV. Raja Taheta Perdana**, yang bukan hanya menjadi ruang bertumbuh secara profesional, tetapi juga medan tempur penuh semangat yang membentuk mental baja dan daya juang penulis. Di tengah peluh dan tekanan pekerjaan, justru tercipta tawa, persaudaraan, dan semangat kolektif yang membakar tekad untuk terus maju. Terima kasih atas energi, dukungan, dan solidaritas luar biasa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan menyeimbangkan kerja keras dan perjuangan akademik ini.
11. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023, atas kebersamaan, kerja sama, serta lingkungan belajar yang positif dan penuh inspirasi.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi, bantuan, dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberikan sumbangsih ilmiah yang berarti bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum perburuhan dan pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin, Juli 2025
Penulis

Muhammad Enrico Hamlizar
Tulis, S.H

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
a) Kerangka Teori	15
1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Kemanfaatan Hukum.....	15
b) Kerangka Konseptual	19
1. PUTUSAN VERSTEK	19
1.1 Pengertian Putusan Verstek.....	19
1.2 Tujuan Putusan Verstek.....	21
1.3 Syarat-Syarat Acara Verstek	23
2. SITA JAMINAN.....	24
2.1 Pengertian dan Penerapan.....	24
2.2 Objek Sita Jaminan.....	26
3. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	27
3.1 Hubungan Industrial	27
3.2 Dasar Hukum Hubungan Industrial.....	29
F. METODOLOGI PENELITIAN	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Masalah.....	32
3. Sumber Bahan Hukum	32

4. Prosedur Pengumpulan Bahan hukum	33
5. Analisis Bahan Hukum.....	33
G. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	34
BAB II STATUS KEPEMILIKAN HUKUM TERHADAP BENDA YANG TELAH DILAKUKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	36
A. Konsep Hukum Sita Jaminan Terhadap Benda	36
B. Status Kepemilikan dan Ketidakpastian Hukum dalam Putusan Verstek	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS PENJUALAN BENDA HASIL SITA JAMINAN OLEH PIHAK TERGUGAT DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....	63
A. Dasar Hukum Dalam Penggantian Kerugian atas Penjualan Benda Hasil Sita Jaminan.....	63
B. Mekanisme Penggantian Kerugian di Pengadilan Hubungan Industrial	80
C. Tahapan Permohonan Pemenuhan Ganti Rugi Pascaputusan Verstek-Verzet..	85
D. Sanksi bagi Tergugat yang Tidak Patuh dan Beritikad Buruk	92
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	

